

Tata Kelola Remitansi Buruh Migran Indonesia oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Akar Rumput: Praktik Baik, Peluang dan Tantangan

Elisabeth Dewi dan Sylvia Yazid

Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Katolik Parahyangan
Jalan Ciumbuleuit No. 94, Kota Bandung, Jawa Barat 40141
elisabeth.dewi@unpar.ac.id
Diserahkan: 15 August 2017; Diterima: 14 September 2017

Abstract

This study is intended to provide general descriptions of the actors involved in the management of remittance sent by Indonesian migrant workers from their working abroad. Data was collected through interviewing 2 actors at the national level, a national NGO and a government institution, and 3 actors at the grassroot level, a local NGO, academic, and a community of women migrant workers. The interview is intended to identify the actors involved, their relative position and function within the remittance flow, bad practices that need to be avoided and best practices that need to be replicated. This study found that there are still needs for: safe and cheap remittance sending mechanism, remittance is still mainly used for consumption, there is a need for capacity building to assist Indonesian migrant workers to start their own business, and the strong influence of patriarchy culture in the management of remittance sent by women migrant workers.

Keywords: remittances, migrant workers, Indonesia

Abstrak

Kajian ini ditujukan untuk memberikan gambaran umum tentang aktor yang terlibat dalam pengelolaan aliran dana yang dikirimkan oleh buruh migran Indonesia sebagai hasil mereka bekerja di luar negeri. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 2 aktor di tingkat nasional, NGO nasional dan badan pemerintah, dan 3 aktor di tingkat akar rumput, NGO lokal, akademisi dan komunitas buruh migran perempuan. Wawancara ditujukan untuk mengetahui siapa aktor yang terlibat, posisi relatif mereka dan fungsi yang mereka jalankan dalam alur remitansi, praktik buruk yang perlu dihindari, dan praktik baik yang patut direplikasi. Penelitian ini menemukan masih diperlukannya mekanisme pengiriman remitansi yang aman dan murah, remitansi masih lebih digunakan untuk kebutuhan konsumsi, diperlukannya *capacity building* untuk membantu BMI memulai usaha, masih kentalnya budaya patriarki dalam pemanfaatan remitansi yang datang dari buruh migran perempuan.

Kata kunci: tata kelola remitansi, buruh migran, Indonesia.

PENDAHULUAN

Data yang disajikan oleh *Migration and Remittances Factbook 2016 (Third Edition)* yang dikeluarkan oleh *World Bank Group* menggambarkan besarnya arus remitansi yang mengalir melewati batas negara-negara dan kawasan di dunia. Dari data yang berhasil mereka kumpulkan dari publikasi resmi

tentang remitansi, pada 2015, arus remitansi di seluruh dunia mencapai lebih dari 601 miliar dollar AS (*World Bank Group*, 2016). Dari keseluruhan jumlah tersebut, sekitar 441 miliar dolar AS diterima oleh negara-negara berkembang yang merupakan hampir tiga kali jumlah bantuan pembangunan. Perlu

digarisbawahi bahwa data-data yang umumnya dikumpulkan dan dipublikasikan ini seringkali tidak mencakup dana-dana yang tidak tercatat yang ditransfer melalui jalur formal dan informal. Dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada remitansi berasal dari buruh migran, perlu diperhatikan juga bahwa data ini belum merinci asal remitansi tersebut.

Seperti yang disimpulkan oleh Elisabeth Dewi dalam disertasinya, remitansi dalam konteks buruh migran dapat dimengerti sebagai uang dan barang yang didapatkan selama bekerja di luar negeri dan dikirim ke negara asal (Dewi, 2010). Dewi juga menyatakan bahwa bentuk yang paling mudah dimengerti adalah dana yang ditransfer secara formal. Namun dalam praktiknya dapat berupa aset fisik dan sosial seperti yang dinyatakan oleh Engle (2004), di mana remitansi dapat berupa barang yang dapat digunakan untuk perawatan kesehatan dan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, mesin pertanian, barang-barang konsumsi dan di beberapa kebudayaan tertentu termasuk perhiasan, ternak, dan barang-barang yang dapat dijadikan mahar perkawinan (Engle, 2004). Dari pendefinisian di atas dapat dilihat bahwa remitansi dapat didefinisikan dengan cukup luas. Untuk kepentingan penelitian ini, remitansi dimengerti sebagai pendapatan buruh migran yang cenderung berbentuk dana atau mata uang yang dipindahkan ke negara asal baik melalui jalur formal maupun informal.

Penelitian ini berfokus pada Indonesia sebagai salah satu negara yang masih menjadikan pengiriman buruh migran sebagai salah satu kegiatan ekonomi utamanya, di mana remitansi dari buruh migran dipandang sebagai salah satu sumber devisa utama setelah minyak bumi. Dalam deretan data dari *Migration and Remittances Factbook 2016 Indonesia* juga muncul dalam beberapa kategori (World Bank Group, 2016), misalnya dalam prediksi untuk tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke 14 dari daftar negara-negara penerima remitansi tertinggi dengan angka 10,5 miliar dolar AS. Dalam daftar koridor remitansi tertinggi, 2015, jalur dari Saudi Arabia ke Indonesia menempati urutan ke-21 dengan angka 4 miliar dolar AS. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang disebut dalam daftar negara pelaku migrasi di Asia Timur dan Pasifik, di mana koridor Indonesia-Arab

Saudi dan Indonesia-Malaysia termasuk ke dalam 10 angka migrasi tertinggi di tahun 2013. Di tahun yang sama, Indonesia juga termasuk dalam 10 tertinggi negara pelaku migrasi. Di tahun 2015, Indonesia pun masuk ke dalam kategori 10 penerima remitansi tertinggi, tepatnya di urutan ke-empat. Sekali lagi harus digarisbawahi bahwa data di atas tidak menunjukkan secara spesifik berapakah remitansi yang berasal dari buruh migran. Namun bila dilihat dari koridor dan negara tujuannya, seperti Arab Saudi dan Malaysia, yang merupakan tujuan utama buruh migran Indonesia, dapat diasumsikan porsi remitansi dari buruh migran cukup signifikan. Data remitansi buruh migran Indonesia yang akurat sulit ditemukan karena sekali lagi remitansi dapat masuk melalui berbagai jalur, termasuk jalur informal. Namun Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid menyatakan bahwa tahun 2014, jumlah remitansi buruh migran Indonesia mencapai 110 triliun rupiah, tahun 2015 diperkirakan mencapai 140 triliun rupiah (Koran Sindo Daerah, 2015) dan tahun 2016 menurun menjadi 118 trilyun rupiah (CNN Indonesia, 2017).

Tata kelola remitansi melibatkan banyak pemangku kepentingan. Mulai dari buruh migran itu sendiri, lembaga atau individu yang digunakan untuk memindahkan dana tersebut melintasi batas negara, pemerintah dan legislator yang membuat kebijakan dan ikut serta dalam pengelolaan remitansi, individu yang menerima dana di daerah asal, hingga individu dan lembaga yang membantu pengelolaan dana remitansi di tingkat akar rumput. Penelitian ini berangkat dari pengamatan bahwa pertama banyak pihak yang terlibat dalam tata kelola remitansi ini. Kedua, telah diketahui beberapa praktik buruk dalam pengelolaannya seperti penerapan biaya transfer yang tinggi dan pengelolaan dana yang cenderung konsumtif. Namun di saat yang sama, ketiga, telah ada pihak-pihak yang berusaha memperbaiki tata kelola remitansi ini. Penelitian ini akan berfokus pada kenyataan terakhir ini dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola remitansi buruh migran Indonesia untuk menggali *lesson learned* dan *best practices* dari upaya-upaya yang mereka lakukan. Hasil dari penelitian ini kemudian akan dijadikan informasi awal untuk penelitian berikutnya yang lebih komprehensif yang mengolah *lessons learned* dan *best*

practices tersebut menjadi sebuah pemetaan yang mengaitkan upaya dari setiap aktor yang diharapkan dapat menjadi sebuah usulan model tata kelola remitansi buruh migran yang lebih baik bagi Indonesia.

Kajian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola remitansi buruh migran Indonesia dan upaya-upaya yang telah mereka lakukan. Secara lebih khusus, penelitian ini akan melihat: (1) siapa aktor yang terlibat; (2) di mana posisi relatif mereka dan fungsi yang mereka jalankan dalam alur remitansi; (3) *bad practices* apa yang perlu dicatat untuk dihindari; dan (4) *lesson learned* dan *best practices* apa yang patut dicatat dari masing-masing aktor.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengandalkan literatur dan wawancara sebagai sumber informasi. Pelaksanaan penelitian mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola remitansi buruh migran Indonesia.
- b) Menghubungi yang bersangkutan untuk diwawancara.
- c) Merancang *outline* penulisan.
- d) Melakukan wawancara dan pengumpulan data yang lebih mendetail di Jakarta dan Purwokerto.
- e) Melakukan triangulasi data dengan mencocokkan antara data dari *desk study* (studi literatur dan media massa) dengan data wawancara.
- f) Menganalisa upaya yang telah dilakukan masing-masing obyek penelitian.
- g) Penulisan artikel.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang remitansi pada umumnya berada di ranah kajian ekonomi, baik makro maupun mikro, di mana remitansi dihubungkan dengan pembangunan ekonomi, GDP, atau kemampuan ekonomi individunya. Tahun 90an misalnya adalah era di mana kajian tentang remitansi berfokus pada bagaimana remitansi membentuk pembangunan di negara pengirim migran seiring dengan meningkatnya

dengan cukup signifikan jumlah remitansi. Pada era ini muncullah apa yang dikenal dengan *The New Economics of Labour Migration* (NELM). Salah satu artikel yang menganalisa potensi pembangunan dari remitansi dengan menggunakan perspektif NELM ini adalah artikel dari E.J. Taylor. Artikel ini menggunakan contoh-contoh empiris yang menunjukkan bahwa remitansi dapat menjadi faktor positif bagi pembangunan ekonomi. Artikel ini menyorot peran sentral pemerintah dalam meningkatkan potensi pembangunan dari remitansi melalui kebijakan ekonomi. Argumentasi ini akan digunakan dalam penelitian ini ketika mengkaji upaya pemerintah dan wewenang kebijakannya.

Di era 2000an, kajian tentang remitansi buruh migran mulai berkembang dengan mencakup aspek-aspek yang lebih luas dan mendetail dari kajian ekonomi dan mulai memperhatikan dimensi-dimensi sosial dari remitansi. Buku yang diedit oleh Lan Anh Hoang dan Brenda S.A. Yeoh misalnya merupakan salah satu contoh pengelompokan kajian tentang remitansi. Buku ini melihat remitansi sebagai proses yang sangat ditentukan oleh aspek gender, generasi dan erat kaitannya dengan krisis keluarga. Artikel-artikel dalam buku ini akan sangat berguna dalam memahami tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor individual dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertitik tolak pada kajian aktor atau *actor analysis*. Kajian aktor ini banyak digunakan dalam kajian kebijakan, baik dalam maupun luar negeri. Kendala yang dialami penelitian ini adalah aliran dana yang melintasi batas negara dan melibatkan aktor-aktor yang berasal dan berada di negara yang berbeda, maka tidak mudah membuat pembedaan yang tegas antara kebijakan dalam dan luar negeri. Juga disadari bahwa tidak semua upaya menysasar dan mempengaruhi langsung pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga aktor yang dimaksud tidak diidentifikasi spesifik sebagai aktor kebijakan (*policy actors*). Karena itu kerangka yang digunakan lebih mengarah pada kerangka tata kelola global: serangkaian aktivitas, peraturan, serta mekanisme berjenjang yang bersifat formal dan informal, publik ataupun privat, yang ada saat ini. Melalui tata kelola global, kerja sama pengaturan dan

aktivitas antara aktor negara dan aktor-aktor lainnya diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan.

Dari pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa kajian yang telah ada cenderung berfokus pada remitansi dari aspek ekonomi. Telah ada beberapa kajian yang membahas aspek sosial dari remitansi. Dari segi analisa aktor, penelitian ini akan berusaha melihat gambaran luas dari tata kelola remitansi buruh migran Indonesia dengan mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat. Pembatasan dilakukan dengan berfokus pada remitansi dari buruh migran Indonesia dengan melibatkan: (a) kalangan akademisi yang direpresentasikan oleh Ibu Tyas Retno Wulan; (b) NGO nasional yang direpresentasikan oleh *Migrant CARE*; (c) lembaga pemerintah di tingkat nasional yang direpresentasikan oleh BNP2TKI; serta (d) NGO lokal yang direpresentasikan oleh Paguyuban Seruni.

PEMBAHASAN

AKADEMISI PEREMPUAN DAN REMITANSI

Tyas Retno Wulan adalah Kepala Pusat Penelitian Gender, Anak & Pelayanan Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman (selanjutnya disingkat UNSOED). Sejumlah praktik baik (*best practices*) telah dilakukan oleh Ibu Tyas sebagai bagian dari upaya membantu buruh migran dalam konteks remitansi sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh UNSOED. Mereka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mencoba membangun kemampuan masyarakat sekitar bekerja sama dengan STANAS dan wirausahawan Ciputra untuk menumbuhkan rasa kewirausahaan pada masyarakat setempat. Sebelumnya pernah dilakukan kegiatan pengembangan masyarakat serupa baik dari BNP2TKI, BP3TKI, DINSOS dan lain sebagainya dalam bentuk penyuluhan hingga pemberian alat-alat dapur gratis.

Mereka juga bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk memberdayakan dan membantu buruh migran melalui sejumlah pelatihan berkala, contohnya pelatihan keuangan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Lebih lanjut, setelah buruh migran pulang ke Indonesia, Bank Mandiri juga akan dapat memberikan kredit apabila buruh migran tersebut ingin membangun usaha di bidang tertentu dengan pemberian pelatihan oleh Bank Mandiri dalam bidang

tersebut. Di samping itu, UNSOED melakukan kegiatan pengabdian masyarakat salah satunya dengan membantu usaha peternakan bebek yang dimiliki warga setempat untuk mengolah bebek menjadi bermacam-macam produk. Tidak hanya berhenti di situ, para warga juga dibimbing untuk menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan usahanya terutama dalam hal pemasaran. Pelatihan tersebut dilakukan integratif, di mana Ibu Tyas dan rekan-rekan melibatkan keluarga dari buruh migran, baik suami maupun anak-anaknya. Anggota tim kegiatan pengabdian masyarakat UNSOED berupaya agar masyarakat yang dilayani mampu mendapatkan pencaharian di tanah air tanpa harus menjadi buruh migran di luar negeri, untuk mencapai tujuan tersebut maka UNSOED bekerja sama dengan beberapa NGO lokal termasuk Paguyuban Seruni, demi keberlanjutan program-program yang dilaksanakan.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Tyas juga tidak hanya berkisar pada lingkup kegiatan ekonomi melainkan juga kesehatan, baik fisik maupun mental buruh migran dan keluarganya. Bersama dengan pihak terkait, Ibu Tyas berkoordinasi melakukan beberapa upaya peningkatan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya. Bersama dengan dokter setempat, Ibu Tyas mengadakan program pencegahan penyakit HIV/AIDS untuk penduduk setempat. Di samping itu, psikolog dilibatkan dalam pendampingan psikologi anak-anak buruh migran yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kesejahteraan keluarga buruh migran.

Keseluruhan upaya yang dilakukan Ibu Tyas untuk mendampingi buruh migran didasari sejumlah peluang yang dimiliki baik oleh dirinya maupun oleh komunitas buruh migran yang didampinginya. Kedekatan Ibu Tyas dengan komunitas-komunitas buruh migran seperti Paguyuban Seruni dapat menjadi jembatan dalam memahami kebutuhan para buruh migran dan solusi apa saja yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh migran. Melalui komunitas-komunitas tersebut, buruh migran yang menjalani proses berorganisasi dapat didorong untuk tidak berkeinginan lagi menjadi buruh migran berhubung kesejahteraannya sudah meningkat, terutama bagi buruh migran yang sudah memiliki

usaha setelah selesai bekerja di luar negeri. Mereka memiliki potensi untuk lebih sejahtera, lebih berdaya, dan lebih berkembang karena sudah memiliki pemikiran untuk menciptakan sesuatu daripada hanya sekedar menjadi pekerja dengan stigma yang buruk. Bahkan lebih jauh, mereka dapat berkontribusi terhadap masyarakat, salah satunya dengan mengorganisasi banyak pihak untuk membuat kegiatan sosial dan pendidikan.

Beragam upaya yang dilakukan oleh Ibu Tyas tentunya tidak lepas dari sejumlah tantangan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Dari pihak Ibu Tyas sendiri, tantangan terbesar adalah menjaga niat dan semangat untuk melayani melalui sejumlah program yang ditujukan bagi kepentingan buruh migran. Di mana buruh migran dan keluarganya memiliki permasalahan sosial yang beragam, terutama buruh migran perempuan yang menghadapi situasi budaya patriarki dengan pelabelan negatif sebagai warga negara kelas dua.

Dari sisi pihak-pihak yang bekerja sama dengan Ibu Tyas atau pihak eksternal, koordinasi secara komprehensif dan keberlanjutan menjadi tantangan yang utama, di samping ketidakpahaman banyak pihak tentang kebutuhan buruh migran dan keluarganya. Hal tersebut ditambah pula dengan adanya pihak melakukan sejumlah program tanpa mempelajari karakter masyarakat secara menyeluruh, terutama mengenai siapa yang membutuhkan fasilitas keuangan. Akibatnya, kebijakan yang dibuat menjadi bersifat “tarik ulur”, “sepotong” dan “tumpang tindih”, dengan menggunakan parameter keberhasilan dari jumlah orang yang menghadiri acara tertentu dan belum memperhatikan faktor monitoring terhadap keberlanjutan dan hasil dari program tersebut. Akibatnya, program yang ada belum berorientasi pada faktor pemberdayaan, bahkan tidak jarang mempersulit buruh migran dan keluarganya untuk menempuh berbagai proses yang berkaitan dengan ketenagakerjaan mereka dan remitansi yang mereka miliki. Tidak jarang, proses birokrasi pemerintah sangat lambat dan rigid sehingga hanya bersifat reaktif terhadap kasus-kasus yang muncul. Ditunjang lagi oleh proses distribusi informasi-informasi dari pusat mengenai kebijakan, prosedur, serta buruh migran itu yang tidak sampai ke tingkat desa sehingga banyak

terjadi kebingungan dan ketidakjelasan informasi mengenai buruh migran. Pihak desa yang seharusnya menjadi bagian yang penting dalam proses distribusi informasi seringkali tidak mampu memberikan informasi yang tepat padahal dari sanalah buruh migran kebanyakan berasal dan akan kembali pulang.

NGO LOKAL DAN REMITANSI

Paguyuban Seruni merupakan NGO lokal di Indonesia yang melakukan pelayanan kepada para buruh migran terutama pada daerah Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah. Di sini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan para buruh migran, salah satunya adalah mendorong masyarakat untuk menyisihkan uang guna membangun usaha sendiri sebagai wirausahawan / wirausahawati. Paguyuban Seruni mengambil peran sebagai mediator dan penghubung di antara warga yang berminat untuk menjadi wirausaha dengan institusi pendidikan (Universitas Jenderal Soedirman) dan institusi lain (Balai Latihan Kerja) yang dapat bekerja sama dengan para wirausaha untuk memperlancar pekerjaan mereka. Paguyuban Seruni memanfaatkan media radio dan bulletin untuk menyebarkan informasi kepada buruh migran mengenai remitansi, pengelolaan keuangan, ataupun penanganan kasus-kasus tertentu. Di samping itu, mereka melakukan pelatihan untuk mengembangkan potensi usaha dan keterampilan buruh migran dengan pelatihan *public speaking*, pelatihan komputer, atau pun pelatihan dalam bidang lain sesuai dari kebutuhan buruh migran, contohnya buruh migran yang setelah pulang dilatih untuk membuat kue dan membangun usaha pembuatan kue.

Para anggota masyarakat yang bekerja sama dengan Paguyuban Seruni biasanya diutamakan yang sudah berkelompok dikarenakan Paguyuban Seruni merasa bahwa melalui kerja kelompok, tantangan dalam berwirausaha akan semakin mudah dilewati karena anggota kelompok dapat saling bergotong-royong dalam menghadapi masalah serta mampu menjadi pengerat hubungan dan solidaritas kerja para anggotanya. Peserta program-program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Seruni umumnya adalah masyarakat yang sudah kehabisan dana yang mereka peroleh sejak bekerja menjadi

buruh migran di luar negeri, saat ini Paguyuban Seruni tengah berusaha menyebarkan pesan kepada masyarakat untuk mulai menabung dan mulai menjadi wirausaha sebelum mereka kehabisan uang atau berhenti menjadi buruh migran dan hanya mengirim uang untuk dikonsumsi saja, dengan melakukan kegiatan wirausaha diharapkan para anggota masyarakat sekitar Banyumas tidak perlu menjadi buruh migran seumur hidup melainkan mampu menetap di kampung halaman dengan penghasilan yang tetap stabil karena sudah memiliki usaha yang dibangun baik bersama maupun pribadi. Di samping itu, Paguyuban Seruni berperan sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah dan dinas-dinas terkait untuk mengangkat isu mengenai buruh migran di desa, terutama bagi mereka yang berkeinginan untuk memulai usaha setelah bekerja. Paguyuban Seruni mendorong pemerintah untuk menyediakan konsultan bisnis secara gratis atau sedikit berbayar (sesuai kondisi usaha yang dirintis) untuk mendampingi buruh migran tersebut hingga usahanya terwujud.

Sayangnya belum ada kerja sama dengan institusi ekonomi seperti koperasi maupun bank lokal untuk menunjang kegiatan. Hingga saat ini belum ada bantuan dari institusi keuangan pemerintah seperti Bank Indonesia, Pos Indonesia, ataupun Western Union dalam urusan remitansi para buruh migran, padahal pihak-pihak tersebut yang paling berkaitan dengan proses pengiriman remitansi ke Indonesia. Usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh Paguyuban Seruni mengalami sejumlah tantangan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Sebagai sebuah NGO lokal yang berbentuk paguyuban, Seruni menghadapi permasalahan seputar ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya manusia (SDM) yang secara sukarela menggulirkan program-program yang mereka miliki. Belum lagi masalah pendanaan karena mereka bersifat nirlaba, sehingga mereka harus kreatif dan aktif dalam mencari dana terutama kepada donor. Dalam hal lokasi, untuk mencapai tempat pemberdayaan seperti Gumelar dibutuhkan transportasi yang memakan waktu beberapa jam, sehingga seringkali menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi warga setempat dalam kegiatan berorganisasi dan berwirausaha. Ditambah lagi

dengan kesadaran para buruh migran ataupun mantan buruh migran tentang berorganisasi yang masih rendah dan masih banyak istri yang dilarang oleh suaminya untuk mengikuti dan harus adanya iming-iming uang agar acara pelatihan diikuti. Padahal anggaran dari pemerintah yang diterima oleh Paguyuban Seruni seringkali lebih sedikit daripada anggaran yang diajukan karena melibatkan banyak pihak dan apabila anggaran yang diterima dalam bentuk barang biasanya kualitasnya rendah sehingga penggunaannya tidak dapat optimal.

Faktor eksternal yang menjadi tantangan utama adalah koordinasi antara Paguyuban Seruni dan pihak-pihak yang terkait. Dalam beberapa program yang ingin dilakukan pemerintah, baru diinformasikan dalam waktu yang sangat singkat (kurang dari 2 minggu), sehingga proses persiapan, pelaksanaan dan *monitoring* seringkali terabaikan, akibatnya proses untuk melihat dampak dan manfaat dari acara-acara pelatihan tersebut menjadi sulit dilakukan. Seringkali pihak eksternal meminta Paguyuban Seruni untuk melakukan proses *need assessment* dan *monitoring* tanpa memperhitungkan kesiapan Paguyuban Seruni dan pihak terkait lainnya. Hal ini juga diperparah dengan adanya sistem rotasi pegawai di dinas terkait sehingga seringkali pemimpin yang sebelumnya yang sudah mengerti jelas mengenai program dan permasalahan buruh migran, digantikan oleh pemimpin yang baru, sehingga kadang keseluruhan proses yang sudah terjadi sebelumnya harus dilakukan berulang lagi. Ditunjang pula oleh minimnya data dan informasi mengenai buruh migran, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, atau bahkan lebih. Akibatnya, proses pendampingan dan pengembangan pemanfaatan remitansi belum mampu menjamin kesejahteraan bagi buruh migran dan hanya menyelesaikan masalah ekonomi secara sementara saja. Belum ada proses pendampingan wirausaha untuk mantan buruh migran yang berkelanjutan dimulai dengan pembekalan keterampilan, membantu menyiapkan mereka untuk kembali kepada masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi mereka.

NGO NASIONAL DAN REMITANSI

Wiharti, Indah dan Nur merupakan aktivis dari *Migrant CARE*. *Migrant CARE* merupakan NGO nasional yang memfokuskan kegiatannya kepada isu buruh migran. *Migrant CARE* menjadi salah satu organisasi yang membantu menangani isu migrasi dengan cara-cara yang lebih intens. *Migrant CARE* melakukan intervensi di lapangan atau daerah di mana buruh migran memiliki permasalahan tertentu.

Migrant CARE melihat bahwa terdapat 4 hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya perlindungan buruh migran. Pertama, hak informasi calon buruh migran ke luar negeri di tingkat desa. Kedua, mengenai mekanisme pendataan calon buruh migran dan buruh migran yang terintegrasi dalam satu sistem informasi di tingkat desa. Ketiga, berkaitan dengan pengaduan ketika buruh migran mengalami permasalahan. Dan terakhir adalah pendampingan bagi buruh migran, terutama berkaitan dengan tata kelola ekonomi agar buruh migran yang kembali ke Indonesia tidak menggunakan seluruh dana yang diperolehnya di luar negeri hanya untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. *Migrant CARE* menjadikan keempat hal tersebut sebagai instrumen yang diupayakan dan diintegrasikan dengan Peraturan Desa yang diperkuat dengan layanan PPIT (Pusat Pelayanan Informasi Terpadu) di tingkat desa. Hal tersebut diwujudkan melalui program DESBUMI (Desa Buruh Migran) dari *Migrant CARE* yang merupakan sebuah program yang penting dalam memberdayakan buruh migran dan mengumpulkan data mengenai buruh migran yang ada mulai dari data ekonominya hingga data penempatan buruh migran yang ada di desa. *Migrant CARE* mengharapkan bahwa desa bisa menjadi pusat informasi mengenai buruh migran pada tingkat daerah.

Migrant CARE menempatkan posisinya sebagai *supporting system* dalam membantu mengatasi permasalahan buruh migran. *Migrant CARE* mendefinisikan dirinya sendiri sebagai *supporting system* dalam alur remitansi buruh migran bukan sebagai aktor utama karena mereka menganggap inisiatif dan peran utama itu harus datang dari buruh migrannya sendiri. *Migrant CARE* di sini akan berperan untuk memfasilitasi dan membantu

mengarahkan serta mendampingi buruh migran dalam membuat usaha dan mengelola dana remitansinya. Bentuk dukungan yang dilakukan *Migrant CARE* salah satunya dengan mempromosikan produk-produk yang dihasilkan mantan buruh migran. *Migrant CARE* membantu memasarkan produk dari komunitas-komunitas buruh migran dengan mendorong untuk membuka *booth* khusus produk dari para buruh migran di pameran-pameran yang diadakan oleh berbagai pihak termasuk dengan mitra *Migrant CARE* di pemerintahan. Di samping itu, *Migrant CARE* melakukan pendampingan kepada komunitas melalui program yang disebut dengan MAMPU. Namun dalam hal memberikan keterampilan *Migrant CARE* tidak terlibat langsung karena memiliki sumber daya manusia yang terbatas.

Oleh karenanya, keterhubungan antara berbagai komunitas dan kelompok buruh migran bisa menjadi potensi untuk memberdayakan para buruh migran yang memerlukan pelatihan keterampilan tertentu untuk belajar dari buruh migran lain yang sukses dan berhasil menjalankan usahanya. Karena posisi *Migrant CARE* yang bersifat sebagai *supporting system*, *Migrant CARE* memiliki peluang besar untuk menghubungkan antara komunitas-komunitas buruh migran yang sedang membutuhkan (baik itu membutuhkan ketrampilan, dana, atau konsultasi) dengan pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang bisa membantu. Di saat yang sama, kelompok-kelompok usaha para buruh migran yang berada pada tingkat desa memiliki potensi besar terutama ketika benar-benar didampingi dan dilatih untuk melakukan berbagai macam usaha. Selain itu, kelompok yang sudah berhasil dapat membagikan pengalamannya kepada kelompok yang lain sebagai usaha untuk memotivasi dan memberikan pelajaran mengenai memulai usaha.

Berkaitan dengan kendala sumber daya, *Migrant CARE* aktif melakukan kemitraan dengan berbagai komunitas yang salah satunya adalah YCAB (Yayasan Cinta Anak Bangsa). *Migrant CARE* aktif melakukan kemitraan di berbagai daerah terutama untuk mendorong pemanfaatan potensi di lingkungan mantan buruh migran agar menjadi sumber ekonomi di komunitas daerahnya. *Migrant CARE* menjadi salah

satu jembatan penghubungan bagi komunitas buruh migran dengan instansi pemerintah terutama dalam hal pameran produk yang dihasilkan buruh migran. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pemasaran hasil usaha mantan buruh migran yang seringkali menyebabkan usaha mereka tidak bisa berlanjut.

Salah satu tantangan lainnya adalah orientasi kelompok buruh migran yang masih terpusat pada aspek ekonomi dan belum mengangkat isu fundamental seperti identifikasi hak-hak yang dimiliki buruh migran serta bagaimana posisi mereka sebagai perempuan. Oleh karenanya, NGO Nasional ini juga menyorot pada kebijakan-kebijakan pemerintah agar kebijakan yang dibuat lebih berpihak kepada perlindungan buruh migran, seperti UU No. 39 tahun 2004. *Migrant CARE* menggunakan pendekatan atau cara memberikan masukan dalam bentuk naskah akademik dan saran pasal-pasal untuk menggantikan pasal yang berpotensi merugikan buruh migran.

Pada jalur remitansi *Migrant CARE* melakukan pengawasan terhadap jasa-jasa seperti penukaran uang dengan tujuan agar tidak merugikan buruh migran. Tantangan yang dihadapi *Migrant CARE* khususnya dalam tata kelola remitansi adalah data yang masih mengacu pada BI. Sementara remitansi dilakukan melalui agen seperti *Western Union*, Pos dan bank lainnya. *Migrant CARE* melihat bahwa jalur remitansi lewat teman menjadi salah satu permasalahan yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan. Selain itu, *Migrant CARE* melihat bahwa eksistensi buruh migran di komunitas juga sulit dipertahankan. Nilai remitansi yang besar berpotensi menyebabkan tingkat konsumsi yang tinggi, akibatnya dana hasil remitansi habis dipakai untuk membangun rumah atau menyekolahkan anaknya sebelum sempat digunakan untuk usaha tertentu sehingga hal tersebut memaksa dirinya untuk bekerja kembali menjadi TKI. Oleh karenanya, buruh migran cenderung memilih untuk bekerja lagi ke luar negeri dari pada bertahan dalam satu komunitas. Hal tersebut menyebabkan data jumlah remitansi menjadi tidak tercatat dengan baik, sehingga bagi *Migrant CARE* akurasi data remitansi menjadi sulit untuk ditentukan. Motivasi yang menyebabkan *Migrant CARE* untuk terlibat dalam tata

kelola remitansi adalah agar buruh migran dapat memaksimalkan upah yang dihasilkan dari bekerja ke luar negeri untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Salah satu pencapaian bagi *Migrant CARE* dalam tata kelola remitansi adalah melakukan pendampingan dan membuat mantan buruh migran bertahan di dalam komunitas dan buruh migran untuk melakukan usaha dengan remitansi yang diperoleh di dalam komunitas.

Selain itu dalam wawancara *migrant CARE* sangat menekankan kepada payung hukum bagi para buruh migran terutama dalam perlindungan hak-haknya dan kesadaran kepada para buruh migran akan hal apa saja yang menjadi haknya. *Migrant CARE* sebagai NGO Nasional yang mengerti mengenai kebutuhan buruh migran membantu memberi masukan dalam pembuatan peraturan dalam tingkat nasional dan juga daerah mengenai buruh migran terutama tentang perlindungan kepada buruh migran.

KOMUNITAS BURUH MIGRAN DAN REMITANSI

Melalui wawancara singkat dengan beberapa anggota Sri Rejeki sebagai sebuah komunitas buruh migran yang berbentuk paguyuban, tulisan ini mampu memberikan sejumlah informasi berkaitan dengan permasalahan buruh migran di sekitar Banyumas. Menurut mereka, masalah yang cukup pelik bagi buruh migran adalah pemilihan institusi yang menyampaikan remitansi mereka terhadap sanak mereka di kampung halaman, terutama disebabkan karena biaya pengiriman yang cukup mahal di Hong Kong, Singapura dan beberapa negara lainnya, meskipun sudah ada cabang beberapa bank Indonesia di beberapa negara tempat buruh migran bekerja yang seharusnya dapat mempermudah akses pengiriman dana mereka. Seharusnya, pemerintah mengambil peranan lebih besar dalam mempermudah pengiriman remitansi dengan menekan biaya pengiriman karena pada dasarnya biaya pengiriman dana remitansi sangat variatif dan terkadang justru memberatkan para TKI. Idealnya pemerintah membuat perjanjian dengan bank-bank yang sudah memiliki akses terhadap buruh migran di negara penempatan.

Paguyuban ini juga mengontak KBRI dan PJTKI untuk mengurus visa para buruh migran serta berupaya mempertemukan para buruh migran untuk

berbagi ide dan pengalaman serta mencoba membuat mereka bekerja sama untuk mencoba membuat usaha baru sebagai kelompok wirausahawati dengan harapan mereka dapat mendapatkan sumber pendapatan baru. Sebagai contoh, salah satu anggota paguyuban, Mbak Sutini, sosok buruh migran yang setelah bekerja di luar negeri jadi sukses ketika di Indonesia karena terus-menerus tekun mencoba usaha bahkan ketika di Hongkong pun memiliki usaha mandiri. Mbak Sutini mempunyai semangat dan keinginan untuk berubah serta untuk selalu berusaha dan menghidupi keluarga tanpa bekerja lagi.

Paguyuban Sri Rejeki menyadari bahwa pelatihan usaha dalam bidang apapun, contohnya membuat dan membuat taplak meja, harus dilakukan secara berkelanjutan dan bersifat membimbing para buruh migran untuk bisa memiliki dampak signifikan. Bimbingan tersebut diperlukan agar buruh migran yang memulai usahanya dari nol mampu secara terus-menerus menghasilkan produk dengan kualitas bagus dan dapat dipasarkan dengan baik.

Di sisi lain, para buruh migran yang sudah bekerja di luar negeri lalu kembali lagi atau yang biasa disebut TKI Purna, merasa bahwa posisi mereka di masyarakat dan keluarga menjadi lebih diakui dan lebih dipandang karena sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Tetapi hal tersebut tidak berlaku dalam struktur rumah tangga terutama sebagai istri, karena posisi mereka lebih beragam, ada yang dianggap tetap sama saja atau tidak berpengaruh, tetapi ada juga yang menjadi lebih dianggap oleh suaminya. Mereka juga sepakat bahwa kepergian mereka ke berbagai negara sebagai TKI memberikan banyak pengalaman, yang seharusnya dapat lebih dimanfaatkan, baik oleh diri mereka mereka sendiri ataupun pihak-pihak lainnya.

Sejumlah tantangan pun mereka hadapi berkaitan dengan remitansi yang mereka dapatkan selama bekerja di beberapa negara. Pertama, agen-agen perusahaan penghubung TKI tidak memiliki transparansi mengenai biaya yang akan dipotong dari total gaji TKI karena menggunakan agen tersebut. Dengan kata lain, biaya yang ditetapkan jumlahnya tidak tetap dan berbeda-beda karena perusahaan tersebut tidak mau menjelaskan peraturannya. Kedua, hasil remitansi buruh migran yang dijadikan usaha

sangat sedikit karena pada akhirnya usahanyapun tidak berhasil karena modal yang habis dan usaha yang tidak berkembang atau tidak menghasilkan. Ketiga, buruh migran yang mempunyai keinginan untuk mendirikan usaha dan tidak kembali bekerja sebagai TKI menghadapi kenyataan bahwa usaha yang dibuat tidak dapat bertahan lama karena kendala dalam kemampuan pemasaran dan manajemen yang buruk. Terakhir, pelatihan yang diadakan oleh BNP2TKI tidak bersifat menyeluruh terutama dalam hal wirausaha. Misalnya, tidak ada pelatihan keterampilan manajemen, pemasaran, kemasan produk, serta cara meningkatkan nilai jual sebuah produk.

LEMBAGA PEMERINTAH DAN REMITANSI

BNP2TKI merupakan badan yang secara spesifik mengurus berbagai macam isu dan permasalahan buruh migran yang secara resmi dibentuk pada tahun 2008. Menurut BNP2TKI, secara khusus terdapat empat jenis pengiriman remitansi namun yang paling populer sekarang adalah melalui *Western Union* dan Pos Indonesia, yang juga memiliki kelemahan antara lain, potensi terjadi kehilangan atau tidak sampai ke tujuan tepat waktu dalam proses pengiriman uang dan barang.

Pihak BNP2TKI lebih menganjurkan pengiriman uang dilakukan melalui bank, baik Bank Indonesia maupun bank swasta lainnya, karena lebih aman dan keseluruhan proses transaksinya terdokumentasi dengan baik. Hal ini juga akan mempermudah pencatatan data remitansi bagi negara. Selain itu, BNP2TKI memiliki program pemberdayaan buruh migran terintegrasi dalam bentuk edukasi keuangan tentang cara menabung dan berinvestasi ditambah dengan penyuluhan kewirausahaan agar buruh migran tidak selalu bergantung pada pekerjaan di luar negeri tetapi juga memiliki pemasukan yang stabil di kampung halaman. Program edukasi keuangan yang diselenggarakan BNP2TKI seringkali bekerja sama dengan OJK dan BRI, BNI, Mandiri, Maybank serta Sinarmas. Sementara untuk sejumlah program yang menjurus ke penyuluhan kewirausahaan BNP2TKI bekerja sama dengan LKM lokal maupun berbagai mitra yang berlokasi di daerah pelayanan setempat.

Gambar 1. Program 0-5 BNP2TKI



Sumber: Facebook BNP2TKI

Di samping itu, BNP2TKI memiliki program 0-5 sesuai dengan renstra yang mereka miliki dengan target capaian di tahun 2019. Fokus program ini adalah pada peningkatan TKI formal dan pemberdayaan TKI purna, sehingga untuk calon-calon TKI informal kurang diperhatikan dalam peningkatan keterampilannya. Catatan kritis atas program ini adalah belum bersifat berkelanjutan serta belum memiliki fokus terhadap sejumlah masalah sosial yang berkaitan dengan upaya pengembangan kewirausahaan dari para TKI Purna.

Beberapa hambatan dihadapi oleh BNP2TKI dalam menjalankan program ini antara lain kesadaran dari para buruh migran yang cenderung konsumtif ketika baru saja menerima pendapatan dan belum terpikirkan oleh mereka untuk menabung apalagi berwirausaha. Beberapa buruh migran bahkan masih mengalami permasalahan karena tuna aksara, tidak memiliki literasi keuangan dan finansial bahkan ada yang takut untuk pergi ke bank. Proses untuk mengubah pola pikir para buruh migran tersebut membutuhkan waktu yang lama. Permasalahan tersebut dicoba untuk diatasi oleh BNP2TKI dengan cara menghadirkan kunjungan ke institusi perbankan dan mengajak para buruh migran bertemu dengan teller, satpam dan berbagai karyawan bank agar mereka terbiasa dengan kegiatan di bank dan mengetahui mekanisme kerjanya. Selain itu, BNP2TKI menyelenggarakan program edukasi keuangan dalam bentuk Pembekalan Akhir

Pemberangkatan yang diadakan ketika para buruh migran akan berangkat menjadi tenaga kerja sementara untuk mengakses daerah pedalaman. Dalam hal ini, BNP2TKI bekerja sama dengan institusi perbankan mengirimkan beberapa mobil perbankan yang sudah mulai mencoba menjangkau ke daerah terpencil, namun hal ini belum efektif karena waktunya yang hanya sebentar, jarak yang jauh, serta infrastruktur yang belum memadai. Di sisi lain, dalam usaha pemberdayaan kewirausahaan, pemerintah membuka empat sektor: pertanian, jasa, ekonomi kreatif dan pariwisata. Permasalahan internal yang dihadapi oleh BNP2TKI sendiri saat menjalankan kegiatan ini adalah kurangnya persebaran BNP2TKI sehingga terdapat kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah pedalaman, ditambah lagi dengan kebutuhan berkoordinasi dengan dinas lain yang jauh lebih rumit apabila menyangkut TKI informal.

KESIMPULAN

Dari sejumlah uraian hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang mewakili beberapa organisasi berbeda di atas dapat disimpulkan poin-poin berikut. Pertama, untuk pengiriman remitansi, buruh migran masih cenderung mencari cara yang paling sederhana dan aman, serta biaya paling murah. Oleh karenanya, untuk perlindungan proses pengiriman perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga jasa pengiriman uang. Meskipun beberapa pihak bank terkait telah berusaha untuk memberikan pelayanan di negara-negara penerima, namun nampaknya masih belum menjadi pilihan yang populer bagi buruh migran Indonesia.

Kedua, penggunaan remitansi masih lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi. Untuk itu perlu dilakukan literasi keuangan bagi para buruh migran sehingga mereka dapat mengalokasikan remitansinya untuk ditabung atau dijadikan modal usaha. Perencanaan ini perlu dilakukan bahkan sebelum keberangkatan untuk bekerja ke luar negeri. Beberapa lembaga keuangan, lembaga pemerintah dan NGO telah berusaha melakukan upaya literasi keuangan ini namun masih belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil.

Ketiga, diperlukan *capacity building* untuk memberikan kemampuan bagi BMI untuk memulai

usaha dengan modal yang didapat dari remitansi. Dalam praktiknya, pelatihan keterampilan diberikan oleh berbagai institusi, namun tidak banyak yang berhasil mengembangkan dan mempertahankan usaha tersebut. Salah satu tantangan bagi upaya memulai wirausaha ini adalah pemasaran, yang belum tersentuh oleh banyak pihak.

Keempat, khusus untuk buruh migran perempuan, pengiriman dan penggunaan remitansi masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang berlaku di dalam struktur rumah tangga mereka. Status mereka di hadapan suami mereka menjadi faktor penentu bagi keberlangsungan dan pemanfaatan remitansi serta keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sejumlah aktor yang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

pengelolaan remitansi buruh migran Indonesia. Hasil dari penelitian ini semakin mengarahkan pada asumsi bahwa karena remitansi lebih banyak digunakan untuk konsumsi dan bukan untuk memulai usaha, maka bekerja ke luar negeri akan tetap menjadi sumber pendapatan bukan solusi sementara. Tantangan yang harus dihadapi sekarang adalah bagaimana mencari bentuk pengelolaan remitansi yang dapat memungkinkan adanya alternatif lain sumber pendapatan setelah jangka waktu tertentu, seperti usaha atau bisnis yang dikembangkan sendiri atau berkelompok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan diwawancarai oleh Gin Gin Ginanjar, Maria Trianita serta penulisan transkrip oleh Rizkita Mardea Nurdiandra dan analisa oleh Ari Santosa.

REFERENSI

- CNN Indonesia, "Bank Dunia: Remitansi TKI Tembus Rp118 Triliun". 28 November 2017. Diakses pada 18 April 2014 dari:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171128114247-78-258562/bank-dunia-remitansi-tki-tembus-rp118-triliun>
- Dewi, Elisabeth. 2010. *Relationships between Women Migrant Workers and Their Children in Indonesia: Feminist Perspectives, Community Values and Motherhood*. Victoria University. Melbourne.
- Engle, LB. 2004. *The World in Motion: Short Essays on Migration and Gender*. Geneva: International Organization for Migration.
- Facebook BNP2TKI. Diakses 18 April 2014 dari
<https://www.facebook.com/bnp2tki>
- Hoang, Lan Anh dan Yeoh, Brenda S.A. 2015. *Transnational Labour Migration, Remittances and the Changing Family in Asia*. London: Palgrave Macmillan.
- Karns dan Mingst. 2010. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Koran Sindo Daerah, "Buruh Migran Harus Dilindungi". 25 November 2015. Diakses pada 23 Januari 2016 dari:
<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=23&date=2015-11-25>
- Taylor, EJ. 1999. "The New Economics of Labour Migration and the Role of Remittances In the Migration Process" dalam *International Migration*, 37 (1), hal 63 – 88.
- Wawancara dengan Ibu Tyas Retno Wulan pada 15 Juni 2016 di Purwokerto.
- Wawancara dengan perwakilan BNP2TKI pada 13 Mei 2016 di Jakarta.
- Wawancara dengan perwakilan Migrant Care pada 13 Mei 2016 di Jakarta.
- Wawancara dengan perwakilan Paguyuban Seruni pada 15 Juni 2016 di Purwokerto.
- Wawancara dengan perwakilan Paguyuban Sri Rejeki pada 15 Juni 2016 di Banyumas.
- World Bank Group. 2016. *Migration and Remittances Factbook 2016* (3rd edition).
- Yazid, Sylvia dan Dewi, Elisabeth. 2015 "Women on the Steering Wheel: Identifying the Potentials of Women in Improving the Protection of Indonesian Women Migrant Workers" dalam *Journal of ASEAN Studies* Vol 3, No 2 (2015), hal. 102 - 115.